



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XIII/2025

PERIHAL
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR JAWA
TIMUR TAHUN 2024**
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
BLITAR TAHUN 2024**
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024**

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Tri Rismaharini, Zahrul Azhar Asumta Gus Hans

PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Blitar Tahun 2024
- Pemohon: Bambang Rianto, Bayu Setyo Kuncoro

PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Ruhamaben, Shinta Wahyuni Chairuddin

PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
- Pemohon: Fitron Nur Ikhsan, Diana Drimawati Jayabaya

TERMOHON

KPU Jawa Timur
KPU Provinsi Banten

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 08.01 – 09.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani
Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Tri Wiyono Susilo

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Yakup Putra Hasibuan
2. Edward Dewaruci

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Hendi Priono
2. Joko Trisno Mudiyanto

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Abdul Hakim

E. Pemohon Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Tulus
2. Busyraa

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Prasetyanto
2. Muhammad Fatahillah

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Muhtar Latief
2. Ichsan Budi Afriyadi

H. Termohon:

1. Abdul Aziz Al Kaharuddin (KPU Kota Blitar)
2. Samsuri (KPU Kabupaten Pandeglang)
3. M. Taufiq MZ (KPU Kota Tangerang Selatan)
4. Aang Kunaifi (KPU Prov. Jawa Timur)

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Puji Muhammad Ridwan
2. Mahrus Ali
3. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
4. Josua Victor

J. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Totok Haryono | (Bawaslu RI) |
| 2. Imam Purnama | (Bawaslu Kabupaten Pandeglang) |
| 3. Acep | (Bawaslu Kota Tangerang Selatan) |
| 4. Ilham Sarlito | (Bawaslu Kota Tangerang Selatan) |
| 5. Roma Hudi Fitrianto | (Bawaslu Kota Blitar) |
| 6. Sarwi Ruci | (Bawaslu Kota Blitar) |
| 7. A. Warits | (Bawaslu Provinsi Jawa Timur) |
| 8. Dewita Hayu Shinta | (Bawaslu Provinsi Jawa Timur) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 160, 265, 223, 141 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Hari ini kita ketemu lagi dalam ruangan ini setelah break hampir sekitar ... ya, 8 bulan mungkin ya, 8 bulan atau 7 bulan, dan kita ketemu lagi dengan agenda yang mirip-miriplah, walaupun ada kekhususan di sana-sini.

Ini yang beruntung yang dapat pagi ini, sesi pembuka, setiap yang pertama itu selalu menjadi catatan khusus. Nah, pagi ini kita akan menggelar Pendahuluan. Jadi, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon, dalam hal ini adalah 141, Walikota Kota Blitar. Kemudian, 160 untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kabupaten Pandeglang (Bupati), 223 untuk Sengketa Hasil Kota Tangerang Selatan, dan terakhir sesi pagi ini, yaitu perkara Nomor 265, Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Layak sebagaimana biasanya, kami akan ... apa ... mengawaki bertiga, Panel II ini, saya, kemudian Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Dan kebetulan beliau ini hari ini ulang tahun ini. Nah, ya, enggak boleh bertepuk dalam ruang sidang, begitu. Tapi biar suasananya agak cair, perlu disampaikan, semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Terutama, Yang Mulia Pak Arsul Sani yang hari ini merayakan ulang tahun.

Sebelum dimulai, silakan kepada Pemohon Nomor 141 memperkenalkan diri, cepat saja!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [02:40]

Siap, Yang Mulia.

Kami dari Tim Kuasa Hukum Pemohon 141, Hendi Priono dan Joko Trisno Mudiyanto.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:50]

Oke, terima kasih.

Kemudian Pemohon untuk 160 ... 160. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [03:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pemohon dari Pemohon Perkara Nomor 160, atas nama Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya, hadir Kuasa Hukum, saya, Muhtar Latief, dan rekan saya Ichsan Budi Afriyadi. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Terima kasih. Pemohon untuk Perkara 223 (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [03:21]

Hadir (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Kota Tangerang Selatan, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [03:29]

Hadir, Yang Mulia (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [03:29]

Kami dari Kuasa Hukum atas nama Tulus dan Busyraa.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Oke, Pak Tulusnya enggak ada, ya? Oke, oke. Kalau di belakang itu enak, Pak, kita menguasai sendiri. Kalau di depan ini berebut, nih.

Terakhir, untuk Perkara 265, Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Kuasa Hukumnya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [03.45]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, kami tim dari Bu Risma dan Gus Hans, saya mewakili dari tim Kuasa Hukum Tri Wiyono Susilo. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Satu orang, ya?
Oke, terima kasih.
Sekarang kita lanjut ke Termohon untuk kuas ... apa ... Perkara 141, silakan!

14. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [04:26]

Mohon izin, Yang Mulia.
Kami Kuasa Termohon dari Perkara 141 atas nama Puji Muhammad Ridwan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Oke.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [04:32]

Beserta Prinsipal dari KPU Kota Blitar, Yang Mulia, atas nama Abdul Aziz Alkharuddin.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Oke, terima kasih.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: PUJI MUHAMMAD RIDWAN [04:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Perkara 160?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [04:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kuasa Hukum dari Termohon KPU Pandeglang, kemudian ada Prinsipal KPU Pandeglang, Pak Samsuri. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Termohon untuk Perkara 223 Kota Tangerang Selatan!

22. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [05:08]

Baik, Yang Mulia.

Saya Kuasa Hukum dari Termohon atas nama Rezky Panji dari Kantor Law Office Saleh and Partner selaku Kuasa KPU Kota Tangerang Selatan, dan ada Prinsipal kami atas nama Bapak M. Taufiq.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Terima kasih.

Terakhir dari Perkara Nomor 265!

24. TERMOHON: AANG KUNAIFI [05:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Aang Kunaifi, Termohon Perkara 265 didampingi Kuasa Hukum kami, Pak Josua.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Oke, terima kasih.

Kemudian, kepada Pihak Terkait untuk Perkara 141?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [05:44]

Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Saya tim hukum Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba Kota Blitar sebagai Pihak Terkait atas Perkara 141, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:54]

Terima kasih.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [05:55]

Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:56]

Perkara 160, Pihak Terkait? Tidak ada, ya? 160? 223, silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [06:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Perkara 223, hadir saya Totok Prasetyanto dan rekan saya Bapak Muhammad Fatahillah. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Terima kasih.

Kuasa hukum Pihak Terkait Perkara 265?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 265/PHP.GUB-XXIII/2025: YAKUP PUTRA HASIBUAN [06:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait Perkara 265 yang hadir adalah kuasa hukumnya, saya sendiri Yakup Putra Hasibuan dengan rekan saya Edward Dewaruci. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Terima kasih.

Kemudian Bawaslu, pemberi keterangan, silakan!

34. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Bawaslu RI, Totok Haryono didampingi oleh Imam Purnama dari Pandeglang, Pak Imam.

Lalu, Pak H. Acep dan Pak Ilham Sarlito dari Tangerang Selatan.

Lalu, Pak Sarwi Ruci dan juga Pak Roma Hudi dari Kota Blitar.

Ketua Bawaslu Provinsi, Pak A. Warits dan Ibu Dewita Hayu Shinta dari Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Terima kasih, Mas Totok. Ini timnya Bawaslu tetap kompak kelihatannya. Yang paling menarik itu pecinya enggak ganti-ganti dari dulu, ya? Mas Totok? Nanti saya bilang Ketua Bawaslu itu diganti itu peci itu supaya kelihatan lebih (suara tidak terdengar jelas).

Sebelum sidang dimulai, ada beberapa hal yang mesti kami beri tahukan.

Pertama bahwa hari ini adalah menyampaikan Permohonan Pemohon. Pemohon atau kuasa hukumnya diberi waktu paling lama menyampaikan permohonannya itu 15 menit. Karena kami sudah punya permohonan dan bahkan kami sudah punya telaah hasil ... apa ... gelar perkara. Jadi, enggak usah dibacakan semua, poin-poinnya saja, itu yang pertama.

Yang kedua, yang disampaikan itu apa yang ditulis dalam Permohonan Perbaikan. Oke? Nanti kalau ada yang di luar itu, itu dianggap tidak ada. Dan kami akan ingatkan.

Yang ketiga, tidak ada lagi Perbaikan Permohonan. Karena waktu perbaikan permohonan sudah kita berikan.

Jadi, nanti Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, akan menjawab atau memberikan keterangan berbasis Permohonan Perbaikan yang diregistrasi. Ini penting. Supaya nanti enggak ada lagi yang mengatakan, "Ini ada perbaikan, ada renvoi," dan segala macam. Tidak ada. Dan itu sudah diberikan waktu untuk perbaikan. Jadi, enggak ada lagi perbaikan. Kalau ada yang mau menyampaikan bukti, terutama Pemohon menambahkan bukti, silakan! Nanti akan kita verifikasi, terakhir nanti akan kita sahkan.

Nanti kalau sidang berikutnya, ketika Termohon memberikan jawaban, Pihak Terkait menyampaikan keterangan, Bawaslu menyampaikan keterangan, masih ada kesempatan untuk menambahkan bukti. Oke, cukup, ya? Klir? Ini ... apa namanya ... supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain.

Nah, hari ini hanya akan mendengarkan Pemohon saja, nanti akan ada giliran yang lain-lain. Jadi, mereka harus diberi waktu juga untuk menjawab Permohonan tersebut.

Silakan, Kuasa Pemohon untuk Perkara 141! Maksimal 15 menit.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [09:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Ini dibacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia?

37. KETUA: SALDI ISRA [09:54]

Ya, poin-poinnya saja, Pak.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [09:56]

Siap. Terima kasih. Permohonan yang kami ajukan itu objeknya adalah keputusan dari KPU Kota Blitar tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, dalam hal ini adalah Pasangan 02.

Kemudian mengenai Kewenangan Mahkamah sudah kami sampaikan pada (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [10:18]

Dianggap saja, dianggap sudah dibacakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [10:21]

Dianggap sudah dibacakan.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [10:21]

Kemudian, yang soal Kedudukan Pemohon, sebagaimana sudah kami uraikan dalam Permohonan kami. Dalam hal ini, perlu kami tegaskan meskipun secara formil itu tidak memenuhi syarat karena dalam pemilihan di daerah kami seharusnya maksimal itu bedanya 2%, tetapi di sini melebihi 2%. Namun, kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan tetap meloloskan perkara ini sampai pada tahap pembuktian, karena dalam beberapa perkara ada kejadian-kejadian tertentu yang soal ambang batas itu diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kami uraikan dalam Permohonan kami.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:30]

Oke, silakan lanjut!

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [10:32]

Kemudian, yang kedua mengenai tenggang waktu, Yang Mulia. Penetapan KPU itu dilakukan pada hari Rabu 4 Desember. Memang menurut kami ada beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi yang itu tidak seragam. Dalam berbagai putusan pilkada itu menghitung tenggang waktu itu sejak penetapan itu dilakukan. Tetapi kami mempunyai satu data juga, dalam perkaranya Prof. Dr. Denny Indrayana yang kemudian menjadi sinopsis di website resmi dari MK Perkara Nomor 146, itu menghitungnya 3 hari itu setelah, itu kami pegang sinopsisnya, Yang Mulia. Kemudian, kami berpendapat meskipun kami itu melakukan pendaftaran di 3 hari terakhir setelah penetapan itu, berdasarkan sinopsis yang ada di MK. Kemudian, kalau kita berpikir menggunakan metode interpretasi futuristik, kemarin di proses pilpres itu pada pengujian pasal berapa ... saya lupa, Yang Mulia. Itu ketika 3 hari itu kemudian dimaknai 3 hari setelah (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [12:32]

Pokoknya, Bapak mau menyampaikan ini memenuhi tenggat waktu, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [12:35]

Siap.

47. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Dengan segala argumentasinya, nanti kami baca.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [12:37]

Siap.

49. KETUA: SALDI ISRA [12:38]

Silakan!
Apa lagi yang mau disampaikan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [12:41]

Kemudian, mengenai inti dari Permohonan kami, itu ada 2 alternatif, Yang Mulia. Dengan berbagai macam pelanggaran yang kami sampaikan. Mulai dari prapelaksanaan pemungutan suara, kemudian pada hari H pelaksanaan pemungutan suara. Salah satu yang kami mohonkan karena ini pelanggarannya terkait dengan money politics, kami meminta calon terpilih itu didiskualifikasi dan kami dinyatakan sebagai pemenang.

Kemudian, alternatif yang kedua sebagaimana kami uraikan dalam Posita, adanya berbagai pelanggaran di TPS-TPS yang kami sebutkan, kami juga meminta ada pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang kami sebutkan.

51. KETUA: SALDI ISRA [13:24]

Oke.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [13:25]

Intinya begitu, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [13:27]

Ada lagi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [13:28]

Sementara cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [13:29]

Jadi ini, dua. Satu, soal basis TSM, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [13:33]

Ya.

57. KETUA: SALDI ISRA [13:34]

Yang kedua, memang ada persoalan suara di beberapa TPS, begitu?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [13:41]

Siap.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:41]

Dan itu sudah dikemukakan di Permohonan ini dan bahkan sudah disebut ya, beberapa TPS-nya secara eksplisit dalam Petikum.

Ini selisih suara Pemohon dengan ... apa ... berapa?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [13:57]

Itu selisihnya 6.000.

61. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Oke.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:01]

Kalau memakai ukuran itu memang 6%, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [14:05]

6%.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:05]

Ya.

65. KETUA: SALDI ISRA [14:05]

Yang menang itu berapa suaranya, Pak, kalau Bapak ingat? Pasangan calon nomor berapa?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:11]

Pasangan 02.

67. KETUA: SALDI ISRA [14:13]

02?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:14]

Ya.

69. KETUA: SALDI ISRA [14:15]

Itu Bapak ingat enggak, suaranya 02 itu?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:18]

49.000.

71. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

49.000.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:21]

Sama 43, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [14:23]

Sama dengan ... Bapak ini mewakili kosong berapa?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:25]

01.

75. KETUA: SALDI ISRA [14:28]

01.
43, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:29]

Ya.

77. KETUA: SALDI ISRA [14:30]

Pokoknya 49.000-an, 43.000-anlah begitu, ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:31]

Siap.

79. KETUA: SALDI ISRA [14:32]

Ini ada sekitar 6.000-an, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:36]

Ya.

81. KETUA: SALDI ISRA [14:38]

Selisih suara. Nah, sehingga kalau memakai konstruksi Pasal 158, ini enggak. Tapi Mahkamah memang beberapa kali mengenyampingkan itu.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:48]

Siap.

83. KETUA: SALDI ISRA [14:48]

Sepanjang ada argumentasi yang kuat untuk menyatakan proses penentuannya itu tidak benar.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:49]

Siap.

85. KETUA: SALDI ISRA [14:54]

Nah, itu yang harus Bapak buktikan ke kami.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:54]

Siap.

87. KETUA: SALDI ISRA [14:56]

Benar atau tidak, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:58]

Siap, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [14:57]

Sudah, ya.
Ada lagi yang mau disampaikan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHP.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [14:59]

Cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [15:00]

Cukup? Terima kasih.
Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup?
Nah, itu.

Jadi, singkat-singkat, padat, dan biar nanti Termohon dan Pihak Terkait, beserta Bawaslu yang menjelaskan apa yang didalilkan di sini. Kita dengar pula nanti, jadi enggak perlu ... enggak perlu terlalu ribut-ribut betul. Yang penting tugas Bapak meyakinkan kami, enggak terlalu peduli mereka mau apa dan segala macam, gitu. Tugas semua pihak dalam ruangan ini memberikan poin agar Hakim yakin. Nah, itu yang paling penting. Terima kasih. Ini berarti yang untuk ... apa ... yang untuk Kota Blitar kita selesai.

Kita lanjut sekarang untuk perkara berikutnya, Perkara 160. Silakan, Kuasa Hukum 160!

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [15:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari 160/PHPU.BUP-XXIII/2025 akan membacakan titel gugatan beserta nama pasangan calon, selanjutnya ke pendahuluan.

93. KETUA: SALDI ISRA [16:09]

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [16:09]

Untuk Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Pemohon, Kedudukan Pemohon, termasuk Pokok Permohonan, mohon dianggap terbaca secara terurai. Karena Pokok Permohonan sudah terangkum di dalam pendahuluan (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [16:00]

Selanjutnya kami akan masuk ke Amar Petitum.

97. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Oke, langsung Amar, ya? Wah, ini suka saya (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [16:00]

Tidak, Yang Mulia. Maksud kami (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Kalau Amar itu pekerjaan Hakim, Pak. Jangan diambil!

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [16:33]

Langsung ke Petitum. Mohon maaf.

101. KETUA: SALDI ISRA [16:34]

Bapak ini, baru-baru udah mau mengambil pekerjaan Hakim aja ini.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [16:38]

Siapa tahu.

103. KETUA: SALDI ISRA [16:39]

Ya. Kita ... Bapak, kalau mau ringkas, langsung ke Petitum. Silakan!

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [16:45]

Eenggak, kami akan baca (...)

105. KETUA: SALDI ISRA [16:45]

Tapi kalau Bapak yang merumuskan Amar, marah di sana nanti, Pak.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [16:49]

Bisa aja, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [16:50]

Oke, silakan!

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [16:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024. Bersama ini kami, Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang

Tahun 2004[*sic!*], Nomor Urut 1. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan[*sic!*] Umum Kabupaten Pandeglang berkedudukan di Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini, Permohonan mengaju ... Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember pukul 16.22 WIB.

Pendahuluan.

Penyelesaian perselisihan hasil (...)

109. KETUA: SALDI ISRA [18:01]

Lho, kok dibacakan, Pak?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [18:03]

Ya, tadi saya katakan ke Yang Mulia. Kami akan hanya membacakan Pendahuluan karena rangkumannya ada di situ semua.

111. KETUA: SALDI ISRA [18:09]

Oke, silakan! Pokoknya tidak melebihi waktu ya, Pak, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [18:13]

Ya. Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [18:14]

Silakan!

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [18:14]

Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting sebagai pengawal pembangunan serta proses pendewasaan demokrasi konstitusional Republik Indonesia. Dalam praktiknya, pemilihan umum di seluruh Republik Indonesia banyak diwarnai dan didominasi dengan

berbagai praktik-praktik kecurangan dari money politics, intimidasi, kekerasan, daftar pemilih tetap yang bermasalah, pengerahan pegawai negeri sipil, penyalahgunaan jabatan, fasilitas anggaran negara, hingga penggelembungan, dan pengurangan suara telah ikut meramaikan dan mewarnai peserta demokrasi dalam menentukan calon pemimpin.

Langsung ke halaman 4, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [18:55]

Oke.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [18:56]

Lebih jauh, Mahkamah tidak cukup hanya mempertimbangkan dengan menghitung jumlah persentase suara yang hanya dilihat signifikan tanpa menilai proses yang terjadi dalam pemilihan. Hal demikian dapat dinilai sebagai bentuk kemunduran Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan jumlah persentase suara tanpa menilai proses yang terjadi dalam perolehan suara tersebut, Mahkamah tidak dapat lagi dikatakan menunjukkan peningkatan kemajuannya dalam upaya penyelesaian perselesaian Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun bila diasumsikan Mahkamah bagai kalkulator yang hanya berkutik pada hitungan angka matematis belaka, Mahkamah dituntut untuk lebih berani dalam memutuskan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan tidak mengkerdilkan fakta-fakta pelanggaran oleh karena hanya melihat jumlah perolehan yang signifikan persentasenya.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 ternyata telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2. Terlebih lagi, Calon Bupati Nomor Urut 2 merupakan adik ipar dari Bupati Pandeglang yang saat ini masih menjabat.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2024, di antaranya terkait dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu dengan cara memobilisasi ASN secara masif yang digunakan sebagai perangkat pemenang secara terstruktur, sistematis, dan masif dimana semua Eselon 2 menjadi binwil yang membina wilayah-wilayah di setiap kecamatan dan selanjutnya berjenjang ke tingkat desa, baik kepala desa,

RT, RW, kader Posyandu, dan seluruh ... di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.

Perorganisasi tersebut dilakukan dengan mengerahkan sumber daya struktural, pendanaan, program, dan intimidasi berjenjang sampai ke tingkat TPS, dengan menggunakan perangkat ASN yang dibagi dalam jenjang di setiap pemenangan.

Bahwa perangkat ASN di Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan struktur pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selalu menggunakan intimidasi dengan menyebutkan bahwa calon ini telah mendapatkan perintah "tegak lurus" sampai ke tingkat provinsi. Bahwa doktrin tegak lurus ini dikuatkan dengan adanya dugaan kuat keterlibatan aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mengintimidasi apabila struktur yang dikor ... dikonsolidasi tidak mentaati rencana dan program pemenangan.

Bahwa strategi pemenangan di tingkat TPS dilakukan dengan cara membedah DPT dan merekat disebut sebagai daftar pemilih tegak lurus atau satu paket antara Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2.

117. KETUA: SALDI ISRA [21:19]

Ini ada bukti-buktinya semua, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [21:21]

Ya, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [21:22]

Oke.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [21:22]

Dimana Calon Bupati Nomor Urut 2, Raden Dewi Setiani merupakan adik kandung dari Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, Achmad Dimiyati Natakusumah. Daftar pem ... pemilih tegak lurus tersebut dibedah dan dipetakan untuk selanjutnya dilakukan intimidasi bagi daftar pemilih yang tidak patuh dengan menggunakan kekuatan organisasi perangkat daerah di tingkat desa.

Organisasi terstruktur inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan pra pencoblosan, dengan memengaruhi pemilih, baik itu melalui program kampanye maupun pemberian sembako (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [21:52]

Apa istilahnya? Prapencoblosan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [21:54]

Ya, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [21:56]

Itu apa bentuknya itu? Prapencoblosan itu gimana itu ceritanya ?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [22:01]

Jadi, mereka mengakom (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [22:03]

Ya, ini kan sambil mendalami Saudara juga nih, kalau bacakan nanti enggak tahu juga kita, nih.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [22:06]

Betul, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [22:07]

Apa itu? Prapencoblosan itu, apa itu?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [22:09]

Sebelum pencoblosan, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [22:10]

Ya, kita tahu itu.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [22:10]

Ya, sebelum pencoblosan memang (...)

131. KETUA: SALDI ISRA [22:12]

Bentuknya, apa?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [22:13]

Bentuk organisasi ini dibuat untuk ... apa ... menakut-nakuti, di antaranya.

133. KETUA: SALDI ISRA [22:18]

Oke, oke. tapi itu ... itu ada buktinya semua?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [22:19]

Ada. Ada, Yang Mulia, ada terurai di ini (...)

135. KETUA: SALDI ISRA [22:21]

Oke. Oke, kalau yang Anda sampaikan di sini ini kan ndak jelas ini, di mana buktinya dan segala macam.

Oke, terus apa lagi yang mau disampaikan?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [22:30]

Selanjutnya.

Salah satu contoh telah terjadinya kegiatan bagi-bagi uang pada masa kampanye dengan sangat terbuka dan menjadi viral di media sosial maupun berita elektronik yang dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 2, yaitu Raden Dewi Setiani, yang terjadi di Kampung Kadubungbang, Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, sekitar tanggal 8 November 22 ... 2024. Dan atas hal tersebut, telah banyak laporan, baik oleh pasangan calon maupun masyarakat. Namun, faktanya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan/atau Gakkumdu, dengan alasan tidak memenuhi unsur, padahal kejadian tersebut sangatlah nyata, bahkan pemberi dan penerima uang dalam video sangatlah jelas.

137. KETUA: SALDI ISRA [23:07]

Itu halaman berapa? Yang Anda bacakan?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [23:09]

Halaman 6, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [23:11]

Halaman 6? Oke.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [23:15]

Selanjutnya, bahwa selain bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 di atas, pelanggaran-pelanggaran lain yang secara terstruktur, sistematis, dan masif juga terjadi dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024. Seperti Hj. Irna Narulita, selaku Bupati aktif Kabupaten Pandeglang yang merupakan kakak ipar dari Calon Bupati Nomor Urut 2, secara terstruktur, sistematis, dan masif telah melakukan tindakan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengumpulkan Kepala Desa Kabupaten Pandeglang untuk membuat video dukungan dengan berkata terdapat ucapan dukungan penuh kepada D-2 yang berarti kepada Raden Dewi Setiani selaku Calon Bupati Nomor Urut 2. Hal tebut ... hal ter ... tersebut terbukti dengan adanya video Bupati aktif Irna Narulita bersama para Kepala Desa bernarasi sebagai berikut.

"Hari ini saya sedang dengan para juara-juara terbaik se-Pandeglang, para kepala desa menjadi garda terdepan di Kabupaten Pandeglang ada binwilnya, mana lagi, ibu larahnya? Mana wo, siap sukseskan!"

Selanjutnya. Nomor 2 (...)

141. KETUA: SALDI ISRA [24:14]

Ini ada videonya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [24:17]

Ya. Ada videonya, Yang Mulia, dan kita buktikan.

143. KETUA: SALDI ISRA [24:17]

Oke. Nanti kita cek. Apa lagi?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [24:18]

Nomor 2, ket ... halaman 7. Keterlibatan Camat Sindangresmi yang bernama Mukhlis yang menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan arahan memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan cara menekan salah satu pegawai honorer bernama Estri untuk menyebarkan stiker Nomor 2 yang menjadi syarat pengurusan PPPK bagi pegawai honorer tersebut.

Tiga, Kepala Dusun Kampung Situ Potong, Desa Sukamulya yang bernama Asma Asikin juga aktif melakukan kampanye Pemenangan Calon Nomor 2 yang bersangkutan diduga melakukan praktik bagi-bagi sembako dengan cara memanggil satu per satu warga ke rumahnya, dengan memberikan minyak goreng bermerek Fetta.

Yang keempat. Sekretaris Desa Sumur Batu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang yang bernama Basit, aktif mensosialisasikan, menyebarkan alat peraga kampanye Pasangan Calon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Lima, Kepala Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi yang bernama Juman Jamaludin diduga aktif dalam mengkanpanyekan/menyebarkan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Enam, ketidakprofesionalan dan keberpihakan Bawaslu Pandeglang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara selalu abai dan tidak menindaklanjuti laporan-laporan terkait pelanggaran yang dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

145. KETUA: SALDI ISRA [25:33]

Oke. Langsung ke ... ini waktunya sudah mau habis ini.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [25:39]

Halaman 8. Bahwa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir.

Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 harus diselesaikan oleh Mahkamah demi keadilan masyarakat Kabupaten Pandeglang, yaitu dengan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Pandeglang dan/atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi.

Petitum.

147. KETUA: SALDI ISRA [26:06]

Petitum. Oke, silakan!

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [26:10]

Halaman 33.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Tiga, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi sebagai pemenang dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024.

Empat, memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya sebagai Pasangan dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, dan/atau

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pandeglang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan isi putusan ini.

Terima kasih. Hormat kami (...)

149. KETUA: SALDI ISRA [27:22]

Oke. Terima kasih (...)

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [27:23]

Pemohon 160 (...)

151. KETUA: SALDI ISRA [27:24]

Sudah menyampaikan. Coba Anda lihat di halaman 33 itu di Petikum. Itu Petikum angka 5 itu bentuk alternatif untuk angka 4 atau alternatif (...)

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [27:34]

Bentuk alternatif.

153. KETUA: SALDI ISRA [27:36]

Ya. Alternatifnya ke angka berapa?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [27:38]

Bentuk alternatifnya angka 5.

155. KETUA: SALDI ISRA [27:39]

Ya. Saya paham itu angka 4?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [27:38]

Ya.

157. KETUA: SALDI ISRA [27:39]

Oke, bla, bla, bla, bla. Kemudian dan/atau 5.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [27:41]

Ya.

159. KETUA: SALDI ISRA [27:43]

Itu angka 5 itu, alternatif ke angka 4 atau alternatif ke mana?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [27:54]

Alternatif ke angka 4, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [27:57]

Ke angka 4, ya?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [27:59]

Ya.

163. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Betul, ya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [28:01]

Betul.

165. KETUA: SALDI ISRA [28:02]

Nanti kita catat, nih.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [28:03]

Ya, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [28:04]

Oke. Jadi, dengan demikian, sebetulnya yang Anda alternatifkan itu adalah memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama bla, bla, bla, dan seterusnya sebagai pasangan calon terpilih, ya?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [28:13]

Ya, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [28:15]

Oke. Atau memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Pandeglang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [28:27]

Betul, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [28:28]

Kalau begitu, jadi kotak kosong di situ?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [28:30]

Tidak, Yang Mulia. Karena kan ada 4 pasangan calon semuanya (...)

173. KETUA: SALDI ISRA [28:33]

Oke.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHP.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [28:34]

Bukan 2 pasangan calon.

175. KETUA: SALDI ISRA [28:35]

Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup?

Jelas, ya? Ini, Termohon ini, Termohon itu di-challenge oleh Pemohon itu. Nanti ... kami nanti akan mendasarkan saja, seberapa kuat ini bukti-bukti. Nah, nanti jangan Anda suruh pula ya, Hakim kan bisa juga mengikuti perkembangan yang terjadi. Bukan pekerjaan Hakim itu. Hakim akan menilai, seberapa jauh fakta dan bukti-bukti yang dihadapkan di persidangan. Nah, itu yang kami nilai. Jadi kalau oh, ini sudah muncul di sini, sudah muncul di sini, kalau tidak tersaji di persidangan, ndak bisa dinilai Hakim.

Nah, prinsip Hakim pasif itu, Hakim ... karena ini menyangkut 2 pihak, ya? Ada pihak yang disebut interpartis itu, Hakim pasif, pasif dalam pengertian tidak boleh mencari-cari sendiri ... apa ... bukti, kecuali melakukan pendalaman dalam persidangan.

Nah, oleh karena itu, sediakanlah bukti yang kuat semua pihak untuk menjelaskan soal-soal yang begini.

Lanjut, sekarang ke Perkara 223!

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [29:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [30:01]

Kota Tangerang Selatan. Ini masih Banten, ya? Tadi Banten juga?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [30:05]

Betul, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [30:06]

Dekat-dekatlah, Saudaralah ini. Silakan!

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [30:09]

Baik, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin. Dalam hal ini, memberi Kuasa kepada Zainudin Paru, H. Tulus Wahjuono, Busyraa, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya (...)

181. KETUA: SALDI ISRA [30:53]

Disebut sebagai Pemohon.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [30:55]

Disebut sebagai Pemohon.

183. KETUA: SALDI ISRA [30:56]

Ya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [30:57]

Kemudian dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember pukul 00.21 WIB.

Selanjutnya, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

185. KETUA: SALDI ISRA [31:32]

Berwenang, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [31:35]

Dianggap dibacakan.

187. KETUA: SALDI ISRA [31:36]

Ya.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [31:37]

Kemudian, tenggang waktu mengajukan permohonan (...)

189. KETUA: SALDI ISRA [31:42]

Masih dalam tenggang waktu (...)

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [31:42]

Masih dalam tenggang waktu dan dianggap telah dibacakan.

191. KETUA: SALDI ISRA [31:44]

Oke.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [31:44]

Kedudukan Hukum Pemohon.

193. KETUA: SALDI ISRA [31:51]

Silakan!

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [31:52]

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Peserta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 (...)

195. KETUA: SALDI ISRA [32:06]

Pemohon adalah pasangan calon?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [32:07]

Pemohon adalah pasangan calon dan berdasarkan (...)

197. KETUA: SALDI ISRA [32:08]

Oke.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [32:08]

Keputusan KPU 392, Pemohon dengan Nomor Urut 2.

199. KETUA: SALDI ISRA [32:14]

Oke. Terus.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [32:17]

Bahwa (...)

201. KETUA: SALDI ISRA [32:25]

158-nya gimana?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [32:26]

158, berdasarkan ... bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan pembatalan Penerapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dengan ketentuan sebagai berikut.

Yang bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 566.767, sehingga dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 ... 2.833 suara.

Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 212.740 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 354.027 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak selisih 141.287 suara.

203. KETUA: SALDI ISRA [33:41]

Ini cuma 2 pasangan calon, ya?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [33:43]

Betul, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [33:43]

Oke.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [33:45]

Bahwa (...)

207. KETUA: SALDI ISRA [33:45]

Kalau secara persentase ini besar dari 0,5%? Ya, kan?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [33:49]

Betul, Yang Mulia. Bahwa kami (...)

209. KETUA: SALDI ISRA [33:54]

Terus!

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [33:55]

Menelaah Permohonan kami sebagaimana permohonan Mahkamah Konstitusi yang lainnya pada ... antara lain, putusan (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [34:03]

Enggak ada *permohonan Mahkamah Konstitusi*. Putusan Mahkamah Konstitusi.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [34:04]

Maaf, putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya, seperti putusan (...)

213. KETUA: SALDI ISRA [34:08]

Santai saja, santai saja.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [34:10]

50 ... Nomor 50, Nomor 52, dan seterusnya. Kami beranggapan menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum 765 Tahun 2024 tentang Hasil Perolehan ... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

215. KETUA: SALDI ISRA [34:33]

Oke.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [32:00]

Pokok Permohonan.

217. KETUA: SALDI ISRA [34:42]

Poin 1-nya, Pelanggaran Pasangan Calon Nomor 1 dengan melibatkan aparat sipil negara.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [34:48]

Betul, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [34:38]

Nah, coba dijelaskan apa itu yang terjadi?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [34:51]

Bahwasanya telah terjadi secara tersuktur, dan masif, sistematis, dan masif penggunaan ... perkumpulan relawan yang ter ... di dalamnya terdapat unsur ASN yang cukup masif, Yang Mulia. Yang salah satu kegiatannya terjadi pada tanggal 22 September 2024 dalam bentuk kegiatan di pemancingan.

221. KETUA: SALDI ISRA [35:19]

Oke. Ini mancing mania ini, ya?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [35:21]

Mancing mania, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [35:22]

Mantap. Apa lagi?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA 33:23]

Kemudian (...)

225. KETUA: SALDI ISRA [33:29]

Ini ada buktinya semua, ya?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [33:30]

Ada, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [33:31]

Kuasa Hukum ikut mancing juga, enggak?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [33:33]

Tidak, Yang Mulia.

229. KETUA: SALDI ISRA [33:33]

Silakan!

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2024: BUSYRAA [32:00]

Bahwa kemudian juga penggerakan seluruh ... secara masif kader, posyandu, dan RT, RW, kemudian juga salah satu akun media sosial Dinsos Kota Tangerang Selatan juga secara vulgar mengindikasikan dukungan simbol Pasangan Nomor Urut 1, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Oke. Terus, ini akunnya Dinas Sosial Tangsel, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [36:06]

Betul, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [36:07]

Oke. Apa lagi?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [36:10]

Kemudian, tentang Poin B, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [36:15]

Ya.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [36:15]

Pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan Tangerang Terang.

237. KETUA: SALDI ISRA [36:19]

Ya.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [36:19]

Sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Yang Mulia.

239. KETUA: SALDI ISRA [36:25]

Oke. Ini ada foto Paslon Nomor 1 di setiap tiang penerangan jalan, ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [36:32]

Betul, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [36:33]

Nah, nanti foto-foto kita suruh saja menghidupkan lampu atau mematikan lampu kalau sudah malam, kalau punya banyak duit.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [36:39]

Jadi, Yang Mulia, pelaksanaan program tersebut masih dalam tenggang waktu atau kurang dari 6 bulan.

243. KETUA: SALDI ISRA [36:50]

Oke.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [36:51]

Ini yang menjadi titi ... titik tekan kami, Yang Mulia. Sehingga (...)

245. KETUA: SALDI ISRA [36:56]

Ini sebelum 6 bulan pemungutan suara maksudnya?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [36:58]

Betul, Yang Mulia. Sebelum penetapan (...)

247. KETUA: SALDI ISRA [36:59]

Sebelum ada masa pendaftaran calon?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:02]

Sebelum penetapan, Yang Mulia.

249. KETUA: SALDI ISRA [37:03]

Sebelum penetapan calon?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:05]

Ya, Yang Mulia.

251. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Oke. Kan belum ada calon?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:08]

Tapi yang bersangkutan sudah mendaftar, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA [37:10]

Oke.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:10]

Dan secara masif dilakukan pemberitaan di media sosial, mulai dari tanggal (...)

255. KETUA: SALDI ISRA [37:15]

Oke.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:16]

19 sampai dengan tanggal 22 ... 24 September, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [37:21]

Oke. Pasangan calon Anda, enggak ada memberitakan di media sosial juga?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:27]

Tidak, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [37:28]

Oke, lanjut! C?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:30]

Jadi, pemberitaan yang dimaksud adalah pemberitaan terkait program tersebut, Yang Mulia.

261. KETUA: SALDI ISRA [37:34]

Oke.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:34]

Seakan-akan menjadi citra di ... diri dari Pasangan Nomor Urut 01, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [37:40]

Oke, lanjut!

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:44]

Kemudian (...)

265. KETUA: SALDI ISRA [37:45]

Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi (...)

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:46]

Komisi (...)

267. KETUA: SALDI ISRA [37:46]

Pemilihan Umum (...)

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:46]

Pemilihan Umum Tangerang Selatan (...)

269. KETUA: SALDI ISRA [37:47]

Apa itu bentuknya?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [37:49]

Ya, ini berkaitan dengan iklan Komisi Pemilihan Umum, Yang Mulia. Yang lagi-lagi mengindikasikan keberpihakan kepada Pasangan Nomor Urut 1, Yang Mulia. Dengan salah satu pergerakan dari iklan tersebut menggunakan simbol (...)

271. KETUA: SALDI ISRA [38:11]

Jadi, gimana caranya, dia? Coba, coba Anda peragakan sendiri!

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [38:16]

Menggunakan simbol satu jari, Yang Mulia. Dan atas hal tersebut (...)

273. KETUA: SALDI ISRA [38:21]

Jangan-jangan Anda lihat sedang salat mungkin itu, kalau satu jari, itu.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [38:25]

Kemudian, setelah dilakukan protes, akhirnya terhadap keberatan tersebut dilakukan pencabu ... takedown atas video tersebut, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [38:33]

Oke. Di-takedown, ya?

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [38:34]

Siap, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [38:35]

Oke, lanjut!

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [38:37]

Kemudian, pelanggaran ... yang berikutnya adalah pelanggaran pasangan Calon Urut Nomor Urut 1 berupa di masa ... pelanggaran di masa tenang, Yang Mulia. Yaitu (...)

279. KETUA: SALDI ISRA [38:52]

Ini Nomor Urut 1 ini incumbent, ya?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [38:54]

Betul, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [38:55]

Jadi, begitu dia aktif melakukan pelanggaran lagi, setelah habis masa kampanye di masa tenang?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:00]

Siap, Yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA [39:01]

Jadi ... jadi masa paling tidak tenang, ya?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:03]

Betul, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [39:04]

Apa lagi?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:06]

Demikian permoho ... pokok-pokok permohonan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya tentang Petitum, Yang Mulia.

287. KETUA: SALDI ISRA [39:13]

Oke. Sebelum ke Petitum, pertanyaan saya. Pelanggaran-pelanggaran itu ada dilaporkan, enggak?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:18]

Ada, Yang Mulia.

289. KETUA: SALDI ISRA [39:20]

Berapa kali Anda melaporkan ke Bawaslu? Tim Anda ini, yang ... apa ... pasangan calon ini. Nanti biar dijelaskan oleh Bawaslu, itu.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:28]

Siap. Jadi, beberapa ... sesuai dengan Posita kami juga, Yang Mulia, di ... telah kami jelaskan di sana. Terkait be ... laporan yang kami lakukan. Sudah (...)

291. KETUA: SALDI ISRA [39:42]

Ini kan sudah banyak tadi ini, gini, gini, gini (...)

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:45]

Siap.

293. KETUA: SALDI ISRA [39:45]

Gini. Apakah semua itu pernah dilaporkan, enggak?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:47]

Pernah, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [39:48]

Ada buktinya, ya?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:49]

Sudah dijadikan bukti juga, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [39:50]

Ya. Nanti biar dijelaskan oleh ... apa namanya ... Bawaslu Kota Sa ... Tangsel.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:56]

Siap, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [39:58]

Ada lagi yang lain?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHP.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [39:59]

Cukup, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [40:00]

Oke, ada. Silakan ... apa ... Petitem!

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [40:00]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 765 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, tanggal 2 ... tanggal 6 Desember tahun 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Benyamin Davnie, H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars sebagai peserta dan/atau sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1=0 (...)

303. KETUA: SALDI ISRA [41:07]

Oke, dianggap diucapkan.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [41:09]

Dianggap diucapkan.

5. Memerintahkan KPU Kota Tangerang Selatan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ruhamaben, Shinta Wahyuni Chairuddin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

305. KETUA: SALDI ISRA [41:27]

Oke.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [41:27]

Atau, memerintahkan KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Benyamin Davnie, H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars

307. KETUA: SALDI ISRA [41:48]

Kemudian.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [41:48]

7. Memerintahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [41:58]

Terima kasih.

Itu Petitem angka 6 itu kalau dilakukan ... apa ... melakukan PSU lalu dicoret yang Pak Benyamin ... apa ... Nomor Urut 1 itu, jadi nanti Pasangan Calon, kotak kosong, dong?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [42:12]

Betul, Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [42:15]

Wah, enak banget begitu, ya. Tapi oke, ini kan alternatif, ya.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [42:21]

Siap.

313. KETUA: SALDI ISRA [42:21]

Nanti akan kita nilai ... apa namanya ... permintaan-permintaan ini. Apakah ini cukup bukti dan segala macamnya, gitu.

Yang Mulia Pak Ridwan. Ada yang mau didalami?

314. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:33]

Cukup.

315. KETUA: SALDI ISRA [42:33]

Yang Mulia Pak Arsul? Silakan, Yang Mulia, Pak Arsul!

316. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:37]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.
Ini Pemohon, ya?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [42:41]

Siap.

318. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:41]

Anda kan di permohonan, mempersoalkan 3 hal. A, B, dan C itu. Nah, kemudian saya ... apa ... klarifikasi, ya. Terkait dengan yang masuk dalam ... apa ... rumpun pelanggaran yang huruf A, ya. Ini kan dibidang nih, ya. Atas laporan tersebut masih sedang berproses di Bawaslu Kota Tangerang, yaitu tahap pemberian keterangan klari ... atau klarifikasi pelapor. Sekarang apa itu, hasil akhirnya apa, kemudian? Enggak jelas nih yang A. Kalau yang B dan C kan jelas hasil akhirnya Bawaslu. Apa ini?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [43:27]

Baik.

320. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:28]

Yang pelanggaran Paslon 01 dengan melibatkan ASN, organ negara, pegawai honorer. Ini setelah Anda lapor ke Bawaslu, kemudiannya ditindaklanjuti nih, kalau menurut yang ada di sini, ya. Tetapi Anda baru hanya sampai mengatakan bahwa sedang berproses di Bawaslu Kota Tangsel. Ini apa hasil akhirnya?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [43:52]

Izin, Yang Mulia. Kebetulan datanya saya belum dapat.

322. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:55]

Belum.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [43:55]

Sehingga ... jadi, kemarin ketika kami mengajukan Permohonan ini, belum dikeluarkan keputusan dari Bawaslu-nya, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:02]

Oke.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:03]

Pada saat kami mengajui Permohonan ini.

326. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:04]

Oke.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:04]

Mungkin saat ini, sudah. Cuma saya belum pegang dokumen ini.

328. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:06]

Oke, baik. Jadi belum, ya, Anda belum ... belum (...)

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:09]

Pada saat Permohonan ini.

330. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:10]

Oke, pada saat Permohonan ini diajukan.
Oke, itu saja.

331. KETUA: SALDI ISRA [44:15]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Nah, nanti itu tugas Bawaslu menjelaskan itu, sampai di mana prosesnya, karena ini tahapannya sudah ada di MK, kalau ada perkembangan nanti disampaikan dalam proses persidangan. Begitu, ya?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:27]

Siap, Yang Mulia.

333. KETUA: SALDI ISRA [44:28]

Biar kita dengar semuanya, secara terang benderang.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:31]

Izin, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [44:32]

Ya.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:32]

Ada ... bila ada ... daftar ... tambahan alat bukti, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [44:35]

Oke.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:35]

Di persidangan? Atau?

339. KETUA: SALDI ISRA [44:37]

Nanti disampaikan. Udah disampaikan, belum?

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:39]

Belum, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [44:40]

Nah nanti disampaikan, kalau sempat nanti kita cross-check, akan kita sahkan sekarang. Tapi kalau tidak, kan masih ada sidang berikutnya.

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [44:47]

Siap, Yang Mulia.

343. KETUA: SALDI ISRA [44:48]

Ya? Jadi, ... apa namanya ... masih cukup waktu. Tapi kalau ... apa ... kalau Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, itu memang kalau mau menyampaikan bukti sesuai dengan ketentuan, sebaiknya menjelang sidang berikutnya itu.

Nah, ini kan sudah ada ketentuannya di hukum acara, supaya kami bisa memverifikasi dan bisa diketokkan palu. Tapi kalau diselesaikan, diserahkan di tengah persidangan, dan itu menjadi sidang yang ... apa ... yang nanti tergantung perkembangan berikutnya, enggak sempat disahkan, jadi repot juga. Ya? Tolong kita dibantu juga di Mahkamah, jadi kami punya waktu juga untuk memverifikasi, mencocokkan bukti-bukti yang diajukan. Nah, itu tolong dipahami semua. Kalau tidak ada lagi. Ada lagi? Cukup?

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BUSYRAA [45:38]

Cukup, Yang Mulia.

345. KETUA: SALDI ISRA [45:39]

Oke, alhamdulillah.

Terakhir sesi pagi ini, Jawa Timur. Nah, ini, silakan Kuasa Hukum Jawa Timur!

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [45:53]

Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namu buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya mewakili tim Kuasa Hukum dari Ibu Risma dan Gus Hans untuk menyampaikan Permohonan perbaikan ... Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Sebelumnya, kami juga akan mengajukan tamba ... bukti baru, Yang Mulia.

347. KETUA: SALDI ISRA [46:34]

Silakan!

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [46:34]

Tambahan.

349. KETUA: SALDI ISRA [46:35]

Tambahan bukti?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [46:35]

Nanti. Tambahan ... tambahan bukti, Yang Mulia.

351. KETUA: SALDI ISRA [46:37]

Ya.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [46:38]

Dan kemudian, nanti yang akan saya bacakan, kita akan tampilkan ke LCD, Yang Mulia, biar lebih gampang, biar jelas kecurangannya di mana, Yang Mulia.

353. KETUA: SALDI ISRA [46:46]

Ya, sabar! Silakan, kalau mau menampilkan apa? PPT, ya?

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [46:53]

PPT, Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [46:53]

Nah, silakan! Waktunya 15 menit, ya.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [46:56]

Cukup, Yang Mulia.

357. KETUA: SALDI ISRA [46:57]

Ya, silakan!

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [46:57]

Next.

Oke, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusinya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang kedua, tenggak ... tenggang waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

yang ketiga, Kedudukan Hukum Pemohon, pada intinya kita menun ... ingin menunda pemberlakuan Pasal 158, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [47:18]

Oke.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [47:18]

Selanjutnya, Pokok Permohonan.

Nah, kita bisa lihat, Yang Mulia, di tampilan, Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [47:24]

Jangan "kita". Ya, itu. Ya.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [47:27]

Mahkamah, ya.

363. KETUA: SALDI ISRA [47:27]

Ya, silakan!

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [47:28]

Kita (...)

365. KETUA: SALDI ISRA [47:30]

Kalau menyampaikan itu bahasanya "kami". Jangan dilibatkan pula Hakim dalam Anda menyampaikan itu.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [47:34]

Oke, siap. Siap, Yang Mulia.
Dari grafik data C.Hasil yang tersimpan di situs KPU.

367. KETUA: SALDI ISRA [47:42]

Ya.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [47:43]

Inilah grafik, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [47:45]

Oke.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [47:46]

Yang garis X, itu yang biru. Paling ... yang biru itu Nomor Paslon 01, yang kuning itu adalah Paslon 02, yang merah adalah Paslon 03, terus yang garis X yang paling bawah, itu merupakan waktu penginputan di Sirekap, Yang Mulia.

371. KETUA: SALDI ISRA [48:05]

Oke.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [48:07]

Terus yang Y yang berdiri ini adalah jumlah surat suara yang masuk di Sirekap.

Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah waktu 15.00 itu waktu Sirekap pertama kali di ... tersimpan. Jadi, ada bedanya, Yang Mulia. Ada yang tersimpan dan ada yang di-upload. Yang di tersimpan itu adalah sebenarnya dari bukti kami, dari sekitar 3.000 itu banyak yang sudah tersimpan. Jadi, kenapa dikatakan "tersimpan", karena nanti ada perubahan di situ, Yang Mulia.

373. KETUA: SALDI ISRA [48:42]

Oke.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [48:45]

Dari 15.00 ini, itu dari Paslon 03 ini, Yang Mulia. Paslon Nomor 02, Yang Mulia.

375. KETUA: SALDI ISRA [49:00]

Ya.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:00]

Itu sudah mendapatkan 58,54%. Itu dari (...)

377. KETUA: SALDI ISRA [49:08]

Baik (...)

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:09]

Jam 15.00 di-upload, sampai dengan tengah malam itu tidak ada perubahan sedikit pun, naik 1% pun, Yang Mulia.

379. KETUA: SALDI ISRA [49:15]

Konstan begitu, ya?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:16]

Konstan.

381. KETUA: SALDI ISRA [49:17]

Oke.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:17]

Nah, konstan inilah yang kami sampaikan karena C.Hasil yang disimpan di Sirekap itu, itu yang kami duga yang dimanipulasi. Itulah yang kami sampaikan, selalu kita katakan adalah adanya anomali, Yang Mulia.

383. KETUA: SALDI ISRA [49:30]

Oke.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:30]

Jadi, bagaimana caranya Sirekap ini untuk memenuhi 58%, itu nanti di bawah ini, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [49:40]

Oke.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:41]

Buktinya ada, Yang Mulia. Next.

387. KETUA: SALDI ISRA [49:44]

Terus.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:48]

Nah, inilah (...)

389. KETUA: SALDI ISRA [49:49]

Ini masih situs KPU, ya?

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:52]

Siap, Yang Mulia.

391. KETUA: SALDI ISRA [49:52]

Silakan!

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [49:53]

Ini kan, seharusnya kan, dalam aturannya itu kan jam satu tutup, Yang Mulia.

393. KETUA: SALDI ISRA [50:03]

Jam 13.00 siang?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [50:05]

Jam 13.00 siang. Nah, di sini, itu jam 12.46 itu sudah di-upload, sudah tersimpan. Kita sudah menemukan ada C.Hasil yang di-upload di Sirekap.

395. KETUA: SALDI ISRA [50:16]

Oke.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [50:18]

Selanjutnya. Itu buktinya kita ada semua, Yang Mulia.

397. KETUA: SALDI ISRA [50:20]

Oke. Nanti kita lihat.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [50:21]

Ya. Selanjutnya. Nah, untuk memenuhi lagi, Yang Mulia. Komposisi 58% tadi itu. Inilah peta penyebarannya, pengguna 90% sampai dengan 100% di tiap TPS. Sebelum, sebelumnya. Sebelum. Nah, ini, Yang Mulia. Inilah bentuk penyebarannya, terdapat 2.780 TPS. Ini pengguna 90 sampai 100%.

399. KETUA: SALDI ISRA [50:55]

Oke.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [50:57]

Jadi, 100% itu banyak banget, Yang Mulia. Next.
Ini contohnya, Yang Mulia. Bukti kita, contoh dari bukti yang akan kita sampaikan nanti. Yang 100%, 100%.

401. KETUA: SALDI ISRA [51:13]

Ini pemilihnya yang 100% memilih pasangan calon tertentu, begitu?

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [51:18]

Ya, Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [51:19]

Atau pengguna hak pilih?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [51:21]

Ya, Yang Mulia.

405. KETUA: SALDI ISRA [51:20]

Oke.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [51:22]

Next. Next lagi.

407. KETUA: SALDI ISRA [51:26]

Terus.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [51:28]

Ini pemilih pilgub lebih besar daripada pemilih bupati.

409. KETUA: SALDI ISRA [51:34]

Memilih untuk gubernur lebih banyak dibandingkan memilih untuk bupati, ya?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [51:39]

Ya.

411. KETUA: SALDI ISRA [51:39]

Oke. Tapi kan, enggak dilarang kan, begitu kan?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO

Awalnya kami tidak curiga, Yang Mulia.

413. KETUA: SALDI ISRA [51:42]

Ya.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [51:45]

Awalnya, okelah, mungkin ada tambahan. Next.

415. KETUA: SALDI ISRA [51:50]

Oke.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [51:51]

Ternyata dari C.Hasil yang di ... tersimpan di Sirekap, itu ternyata yang paling kiri, Yang Mulia, itu tambahan enggak ada, Yang Mulia. Seharusnya kan kalau perbandingan antara pilbup dan pilgub itu kan harusnya ada tambahan dari tiga ... kalau misalnya pilbup itu 349, kalau misalnya ditambahkan dari gub ... gubernur, itu kan ada tambahan nanti di samping, kan?

417. KETUA: SALDI ISRA [52:02]

Ya.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:14]

Dan ini X, X semua, Yang Mulia.

419. KETUA: SALDI ISRA [52:18]

Oke.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:19]

Next.
Yang bawah sama, Yang Mulia.

421. KETUA: SALDI ISRA [52:21]

Terus?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:23]

Ini perolehan suara Paslon 3, kurang dari 30 sampai 0 itu terdapat 3.900 TPS.

423. KETUA: SALDI ISRA [52:34]

3.900 TPS?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:34]

Ya, Yang Mulia.

425. KETUA: SALDI ISRA [52:35]

Itu yang gimana? Yang kurang ... yang kurang dari berapa?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:35]

30 hingga 0, Yang Mulia.

427. KETUA: SALDI ISRA [52:41]

Oke. Berarti 30 suara sampai 0 suara, ya?

428. KUASA HUKUM PEMOHON 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:44]

Ya. Yang Mulia.

429. KETUA: SALDI ISRA [52:45]

Oke.

430. KUASA HUKUM PEMOHON 265/ PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:46]

Ini bentuknya C.Hasilnya, Yang Mulia. Bahkan di ... sesuai dengan peraturan kan harusnya kalau misalnya ini dikosongkan harus dicoret, Yang Mulia.

431. KETUA: SALDI ISRA [52:56]

Oke.

432. KUASA HUKUM PEMOHON 265/ PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:56]

Banyak yang kita temukan itu kejanggalan-kejanggalan inilah yang kita sampaikan anomali-anomali, Yang Mulia.

433. KETUA: SALDI ISRA [52:56]

Terus?

434. KUASA HUKUM PEMOHON 265/ PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:56]

Terus suara tidak sah pilgub di atas 10% sampai dengan 100%, Yang Mulia.

435. KETUA: SALDI ISRA [53:09]

Suara tidak sah pilgub?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [53:01]

Ya.

437. KETUA: SALDI ISRA [53:11]

Oke.

438. KUASA HUKUM PEMOHON 265/ PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [53:11]

Terdapat 4.174 TPS. Seperti ini, Yang Mulia, contohnya. Next, next, next, next, next lagi, next. Ya, ini.

439. KETUA: SALDI ISRA [53:33]

Terus?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [53:34]

Next, ini tampaknya tanda tangannya juga kayak aneh, Yang Mulia.

441. KETUA: SALDI ISRA [53:41]

Ya.

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [53:42]

Lanjut.

Suara tidak sah, pilgub lebih besar daripada pilbup.

443. KETUA: SALDI ISRA [53:50]

Oke.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [53:51]

Tadi yang tambahan yang di atas tadi, Yang Mulia. Penyebarannya, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [53:54]

Anda hitung enggak, berapa suara-suara tidak sah itu semua untuk pil ... pilgub? Ada, ya?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:48]

Ada, Yang Mulia.

447. KETUA: SALDI ISRA [53:58]

Oke, lanjut.

Suara tidak sah pilgub itu 822.394. Sementara pilbup=366.273, ya?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [54:11]

Ya, Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [54:11]

Oke. Apa lagi?

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [54:12]

Next.

Ini salah satu dugaan kami, Yang Mulia, perbedaan antara Form C dengan Form D. Ini sangat nyata, Yang Mulia, di sini.

451. KETUA: SALDI ISRA [54:27]

Oke. Nanti kita akan tanya ini ke KPU ini. Ini formulir Anda atau segala macamnya. Oke, terus?

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [54:34]

Oke, next.

Ini bentuk se ... bukti yang kami akan sampaikan nanti. Ini juga C.Hasil yang di tipp-ex, Yang Mulia. Padahal kan yang di aturan itu harus dicoret, Yang Mulia.

453. KETUA: SALDI ISRA [54:46]

Ya.

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [54:46]

Ini sampai saat ini kami sudah ... kita copy, Yang Mulia. Jadi (...)

455. KETUA: SALDI ISRA [54:53]

Oke.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [52:46]

Website ini kita masih simpan.

457. KETUA: SALDI ISRA [54:55]

Oke.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [54:55]

Oke, Yang Mulia. Next.

Ini penyebaran Bansos di Jawa Timur, Yang Mulia.

459. KETUA: SALDI ISRA [55:03]

Terus?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [55:03]

Nah, penjelasannya ini, Yang Mulia. Ini kan peta ini yang ... yang ... yang ... gelap (...)

461. KETUA: SALDI ISRA [55:09]

Tolong digeser itu (...)

462. KUASA HUKUM PEMOHON 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [55:10]

Next, next (...)

463. KETUA: SALDI ISRA [55:10]

Gambarnya (...)

464. KUASA HUKUM PEMOHON 265/PHPU.BUPX-XIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [55:12]

Next, next, next (...)

465. KETUA: SALDI ISRA [55:512]

Terus (...)

466. KUASA HUKUM PEMOHON 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [55:15]

Next (...)

467. KETUA: SALDI ISRA [55:18]

Nah (...)

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [55:18]

Oke.

Ini yang merah pekat ini, inilah penyebaran bansos yang tertinggi, Yang Mulia, sampai dia sedikit mudar, mudar, mudar, mudra, itu berkurang penyebaran bansosnya di Jawa Timur. Setelah kami menggunakan data, Yang Mulia, menggunakan program, ternyata ... next, penyebaran bansos dan perolehan Paslon 02 itu ada korelasinya, Yang Mulia.

469. KETUA: SALDI ISRA [55:48]

Oke.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [55:48]

Kalau kita lihat dari sebelumnya merah yang pekat dengan hijau yang pekat ini itu memiliki korelasi, Yang Mulia, dan variabelnya sangat signifikan, perlu kita lihat dari gambar tersebut.

Dan untuk menghitung bagaimana korelasi antara pemberian bansos dan tingkat pemilih dari 02 ini itu adalah rumusnya, Yang Mulia. Inilah rumusnya yang terakhir. Next.

Nah, ini rumusnya, tapi nanti kita akan hadirkan ahli, Yang Mulia, untuk menjelaskan bagaimana dengan proses penemuan dari hubungan dari pemberi ... pemberian bansos dan pemilih perolehan 02.

471. KETUA: SALDI ISRA [56:33]

Lanjut.

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [56:36]

Dan yang terakhir Petitem, Yang Mulia.

473. KETUA: SALDI ISRA [56:39]

Oke.

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [56:42]

Yang pertama, mengabul ... satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 21.30 WIB.

Tiga. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak karena telah melakukan pelanggaran secara struk ... terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2024.

Empat. Menetap ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

475. KETUA: SALDI ISRA [57:27]

Terus, dibacakan.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [57:28]

Lima, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

477. KETUA: SALDI ISRA [57:29]

Dibacakan saja!

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [57:31]

Ya.

Enam, memerintah kepada KPU (...)

479. KETUA: SALDI ISRA [57:33]

Nomor 4!

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [57:33]

Meminta KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini (...)

481. KETUA: SALDI ISRA [57:35]

Hei! Anda bacakan Petitum itu secara lengkap.

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [57:38]

Oh, ya.

Empat. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 21.30 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

Nomor ... Pasangan 1, H. Luluk Nur Hamidah, M.Si., dan H. Lukmanul Hakim, M.Si. Perolehan suara=1.797.332.

Tiga. Dr. (H.c) Ir. Tri Rismaharini, M.T. dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, S.Ip., M.Kes.=6.743.095.

Atau memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Luluk Nur Hamidah, M.Si., dan H. Lukmanul Hakim, M.Si., dan pasangan calon dengan Nomor Urut 3, Dr. (H.c) Ir. Tri Rismaharini, M.T., dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, S.Ip., M.Kes. Dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.

Enam. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

483. KETUA: SALDI ISRA [58:25]

Ya, pertanyaannya sama ini.

Itu Petitum yang angka 5 itu, alternatif untuk angka berapa?

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [58:34]

Nomor 4, Yang Mulia.

485. KETUA: SALDI ISRA [58:35]

Oke.Jadi Petitum angka 5 alternatif untuk angka 4, ya? Oke, terima kasih.

Ini perlu kita ... ini Anda ... apa ... Anda ... apa juga nih, Termohon, jadi hati-hati juga melihat Petitum, kadang-kadang ada yang

mengalternatiskan, tapi ada yang bertentangan satu sama lain, begitu. Nah, itu harus dilihat secara cermat. Makanya pertanyaan kami tadi ini nomor 5 menjadi alternatif dari nomor 4. Ya, kalau nomor 4 tidak dikabulkan, ini ada pilihannya nomor 5. Begitu, ya? Kuasa hukum?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:00:10]

Siap, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:00:11]

Oke. Nah, pertanyaan saya, itu soal suara-suara tadi yang dihitung terakhir itu kan rekap yang berbasis dari ... apa, ya ... berbasis dari TPS, kan?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:00:25]

TPS, Yang Mulia.

489. KETUA: SALDI ISRA [01:00:26]

Oke. Itu kan satu hal, soal penayangan di situs KPU satu hal yang Anda jelaskan tadi, ya? Yang soal suara konstan itu. Tapi proses rekapnya dari TPS jalan, kan?

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:00:38]

Jalan, Yang Mulia.

491. KETUA: SALDI ISRA [01:00:39]

Pertanyaan saya kepada Saudara. Itu berapa TPS yang saksi pasangan calon yang Anda wakili itu, yang tidak tanda tangan di TPS? Anda bisa sampaikan, enggak?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:00:50]

Gimana, Yang Mulia? Mohon diulangi, Yang Mulia.

493. KETUA: SALDI ISRA [01:00:52]

Enggak. Berapa jumlah TPS di Jawa Timur, untuk Pemilihan gubernur?

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:00:56]

Kami peringkat paslon di (...)

495. KETUA: SALDI ISRA [01:00:59]

Ini lawyer harus hafal, dong (...)

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [02:00:00]

Siap.

497. KETUA: SALDI ISRA [02:01:00]

Pasti ditanya Hakim kalau begitu.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:01:02]

Siap, siap, Yang Mulia.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:01:05]

KPU Jawa Timur, ada, enggak? Berapa jumlah TPS?

500. TERMOHON: EDWARD DEWARUCCI [01:01:10]

64.000-an.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:01:12]

Wah, ini KPU aja enggak hafal, coba bayangkan itu. Itu kan main jawab cepat aja itu, pokoknya dikira-kira. 64.000-an lah kira-kira itu, ya.

502. TERMOHON: EDWARD DEWARUCCI [01:01:24]

Belum waktunya menjawab kan, Yang Mulia.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:01:25]

Bukan, saya ... saya Hakim (...)

504. TERMOHON: EDWARD DEWARUCCI [01:01:29]

Oh, ya. Kalau (...)

505. KETUA: SALDI ISRA [01:01:29]

Hakim tanya, harus Anda jawab!

506. TERMOHON: EDWARD DEWARUCCI [01:01:29]

64.280.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:01:32]

Nah, gitu. 64.200?

508. TERMOHON: EDWARD DEWARUCCI [01:01:32]

80.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:01:32]

80. Oke, terima kasih. Jadi, kalau Hakim perintahkan harus Anda kerjakan.

Nah, dari 64.280 TPS itu, berapa pasangan calon yang Saudara wakili yang tidak tanda tangan di TPS ... menandatangani ... apa ... hasil di TPS.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:01:55]

Kami belum hitung semua, Yang Mulia.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:01:56]

Nah, itu. Ini (...)

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:01:57]

Kami hanya mem (...)

513. KETUA: SALDI ISRA [01:01:59]

Bukan, jangan Anda jelaskan, belum hitung, ya sudah, selesai.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:02:02]

Siap.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:02:03]

Nanti kalau pertanyaan ini muncul lagi di sidang berikutnya Anda harus bisa jawab, ya.

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:02:04]

Siap.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:02:04]

Jadi, kita ini harus cari juga. Ini kan problemnya begini juga banyak. Sudah sampai di tingkat akhir, nah, baru tidak tanda tangan. Padahal dari bawahnya tanda tangan semua kadang-kadang begitu. Nah, itu, itu gejala kita itu semuanya, ya. Tolong nanti dicari ya, Kuasa Hukum, ya.

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHP.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:02:27]

Siap, Yang Mulia.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:02:29]

Oke. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan?
Silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

520. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:36]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini Saudara Pemohon, ya.
Kalau menurut hasil perhitungan suara Termohon, ini kan perbedaan antara 2 paslon yang dinyatakan sebagai pemenang, Bu Khofifah dan Pak Emil serta dibanding dengan Bu Risma dan Gus Hans.

Ini kan 5.000.000 saya hitung, 449.070, ya. Tadi Pak Ketua Panel mengatakan, "Berapa dari seluruh TPS itu yang enggak tanda tangan?"

Nah, sekarang saya ingin tanya lebih lagi. Mungkin belum bisa dijawab hari ini. Berapa yang Anda mengajukan keberatan? Ya, saksi dari Paslon Bu Risma dan Gus Hans ini, ya. Satu.

Jadi ini yang belum kami, belum dapat gambaran kan dua hal, ya. Antara Anda yang sebut sebagai anomali, ya, tadi di Sirekap, ya. Kemudian, dikaitkan dengan hasil itu, ya. Harusnya kalau terjadi anomali apa pun itu, ya, seharusnya suara Anda itu berapa, sih? Pertama, yang pertama adalah hubungan sebab akibatnya, kausal verbanya antara anomali dengan perolehan suara itu ... apa ... Paslon Anda?

Yang kedua, itu tadi, berapa sih harusnya? Ini untuk melihat signifikansinya berapa, sih? Karena ini bedanya banyak, beda dengan kalau Pilkada yang bedanya seribu atau ratusan gitu, ya. Ini bedanya 5,449. Jadi, Anda harus yakinkan juga Mahkamah, ya? Harus tunjukkan dalam pembuktian causal verband-nya, hubungan sebab akibat antara anomali dengan perolehan suara Anda itu.

Yang kedua, signifikansinya gitu lho, kalau anomali katakanlah itu ada merugikan suara Anda ya, cuma 500.000, dikurang 500.000 kan masih tetap menang ini, yang dinyatakan pemenang. Itu Anda harus tunjukkan bahwa harus buktikan bahwa anomali atau apa pun sebutannya, itu nilainya adalah 5.000.000-an, gitu. Itu ya, yang pertama.

Yang kedua, ini kan kalau baca Petition Anda, ini kan minta di diskualifikasi, ya? Paslon yang menjadi ditetapkan jadi pemenang, ya. Tapi kalau saya baca di uraian Anda, ini enggak tergambar, ya. Apa sih, dosanya paslon yang Anda ingin didiskualifikasi itu? Yang ada di penyalahgunaan bansos itu adalah dosanya pejabat gubernur menurut Anda, kan gitu? Penyalahgunaan. Nah, ini apa konkretnya? Anda hanya bilang penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu apakah kemudian dengan mengkampanyekan? Misalnya, saya kasih paslon ... bansos, tapi kemudian katakanlah ASN-nya atau jajaran pemprov mengatakan, "Jangan lupa ya, coblos Paslon Bu Khofifah".

Nomor berapa ini? Dua, ya?

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:06:11]

Nomor 2.

522. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:11]

Ya, Nomor 2 itu Khofifah-Emil. Apa, gitu lho? Ini belum tergambar, gitu. Jadi, menurut saya itu harus digambarkan, ya. Ini saya membantu Anda lho, gambarkannya itu di (...)

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:06:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:32]

Bukti. Sebab kalau ndak digambarkan gimana Mahkamah mau meyakinkan itu? Ya, itu aja. Enggak usah dijawab, tapi harus dibuktikan, gitu.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:06:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

526. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:45]

Karena tugas Pemohon itu membuktikan.

527. KETUA: SALDI ISRA [01:06:50]

Cukup?
Pak Ridwan? Cukup, ya.
Jadi ada tempat bukti, ya? Sudah dibawa?

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:07:00]

Sudah ada, Yang Mulia.

529. KETUA: SALDI ISRA [01:07:01]

Di mana sekarang?

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:07:02]

Di bawah, Yang Mulia.

531. KETUA: SALDI ISRA [01:07:07]

Oke. Ini saya ... kami sudah dapat laporan ini karena yang diserahkan itu ada 3.000-an berkas, lumayan banyak juga itu. Jadi, belum bisa disahkan sekarang.

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [01:07:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

533. KETUA: SALDI ISRA [01:07:17]

Nanti akan disahkan di sidang berikutnya.

Ini karena sesi ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita sahkan bukti dulu, ya.

Untuk Perkara 141, memberikan bukti. Jadi, ini pertama dulu, kartu advokat atas nama Joko Trisno Mudianto, masa berlaku KTA itu habis 31 Desember 2024. Ya, betul?

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JOKO TRISNO MUDIYANTO [01:07:57]

Betul, Yang Mulia.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:07:58]

Sudah diperpanjang, belum?

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JOKO TRISNO MUDIYANTO [01:07:57]

Sudah.

537. KETUA: SALDI ISRA [01:08:00]

Sudah? Oke. Nanti disampaikan, ya.

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JOKO TRISNO MUDIYANTO [01:08:01]

Siap, Yang Mulia.

539. KETUA: SALDI ISRA [01:08:03]

Oke.

Kartu Advokat atas nama Hendi Priono?

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:08:06]

Siap, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [01:08:07]

Habis juga, 31 Desember 2024. Nanti ini kalau enggak diperpanjang ... ndak ... ndak ... nanti dicabut kartu anggotanya sama ... apanya nanti ... organisasi advokatnya.

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:08:16]

Siap.

543. KETUA: SALDI ISRA [01:08:16]

Nanti dilengkapi.

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:08:17]

Siap.

545. KETUA: SALDI ISRA [01:08:18]

Bukti. Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21D, betul?

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:08:25]

Betul, Yang Mulia.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:08:26]

Nah, tapi ini hasil catatannya, P-8 sampai dengan P-9A, P-10B, P-10C, P-11, P-14, dan P-15, dalam satu flashdisk dan hanya terdapat satu leges.

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:08:47]

Ya, siap.

549. KETUA: SALDI ISRA [01:08:48]

Nah, dia satu alat bukti, kan? Satu leges, kan?

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:08:51]

Siap.

551. KETUA: SALDI ISRA [01:08:52]

Nah, nanti dilengkapi, ya?

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:08:53]

Siap, Yang Mulia.

553. KETUA: SALDI ISRA [01:08:54]

Ini membantu negara juga, kita ini.

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:08:55]

Siap.

555. KETUA: SALDI ISRA [01:08:55]

Yang kayak-kayak begini.

Jadi, semakin banyak Anda mengajukan bukti, negara makin senang, begitu.

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:09:01]

Siap.

557. KETUA: SALDI ISRA [01:09:02]

Menggalakkan membayar pajak.

Oke. Jadi sepanjang yang tidak ada masalah, kita sahkan dulu, ya?

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HENDI PRIONO [01:09:09]

Siap.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:09:09]

Nanti yang bermasalah, disahkan di sidang berikutnya.

KETUK PALU 1X

Perkara 160. Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52, betul?

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTAR LATIEF [01:09:23]

Betul, Yang Mulia.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:09:24]

Ini tidak ada catatan dan kita. Sahkan!

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 223, ini Surat Kuasa atas nama Basrizal tidak ada tanda tangan. Nanti tolong ditandatangani, ya. Ini biasanya yang belum tanda tangan ini belum selesai perhitungan-perhitungannya ini.

Ya. Kemudian, Kuasa Hukum, banyak KTA Kuasa Hukum yang kedaluwarsa atau habis masa berlaku. Nah, nanti dicek juga. Ini kalau yang kayak-kayak gini balas bayar ... malas bayar iuran ke organisasi advokat, biasanya.

Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, betul? Oke, tidak ada catatan. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Sementara yang dari Jawa Timur, perlu waktu. Ya? Sabar untuk sidang berikutnya, nanti akan kita sampaikan.

Nah ini, 265 ada catatan, nih. KTA habis masa berlaku: Ronny, Alvon, Abdul Rohman, Harli, Belum ada KTA.

Tanda tangan: Abdul Aziz, Fuad, Haryanto, Triwiyono. Nah, nanti dilengkapi itu semua, ya. Jangan soal-soal yang kayak begini, jadi ... apa ... jadi masalah nanti.

Sementara kita sahkan dulu yang pertama, ya. Pengesahan Bukti yang diserahkan pada tanggal 8 Januari, yaitu P-1 sampai dengan P-6, betul? Sudah diverifikasi dan disahkan. Yang lain-lain nanti menunggu.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Berarti sesi kita pagi ini selesai dengan 4 Permohonan. Dan sekarang kalau giliran ini sudah selesai, beban pindah ke giliran Termohon, ke Pihak Terkait, dan ke Bawaslu. Semakin jelas, semakin banyak bukti, semakin mudah kami untuk memutus Perkara ini. Jadi, ini sebetulnya pertarungan bukti, bukan pertarungan opini, bukan pertarungan asumsi. Jadi, semuanya akan berbasis kepada bukti. Jadi, semua pihak, tolong sajikan bukti ke depan persidangan, ke kami. Bukti-bukti itulah nanti yang akan kami nilai.

Oke, ya? Cukup semua?

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:12:05]

Izin, Yang Mulia, izin.

563. KETUA: SALDI ISRA [01:12:06]

Izin, oke. Ini kalau lawyer ini belum ngomong, ini belum bisa minta DP. Silakan! Dari?

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:12:14]

Izin, Yang Mulia. Perkara 14 ... 141, Yang Mulia.

565. KETUA: SALDI ISRA [01:12:18]

Oke, apa masalah?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:12:19]

Untuk izin ... diizinkan untuk inzage atas Perkara 141, Yang Mulia (...)

567. KETUA: SALDI ISRA [01:12:24]

Nah, Anda sudah baca aturannya kan boleh, inzage diperbolehkan sepanjang jam kerja, oke? Tidak boleh difoto itu (...)

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAKIM [01:12:32]

Baik, Yang Mulia.

569. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apa lagi? Kuasa Hukum berapa?

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: YAKUP PUTRA HASIBUAN [01:12:36]

Izin, izin, Yang Mulia (...)

571. KETUA: SALDI ISRA [01:12:37]

Kuasa Hukum nomor berapa?

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: YAKUP PUTRA HASIBUAN [01:12:38]

Dari dari Ku ... Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 265.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:12:41]

265, silakan!

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: YAKUP PUTRA HASIBUAN [01:12:42]

Ya, Yang Mulia, kami mengerti bahwa sidang ini juga terbuka untuk umum dan sudah disajikan live melalui YouTube (...)

575. KETUA: SALDI ISRA [01:12:48]

Ya.

**576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
265/PHPU.GUB-XXIII/2025: YAKUP PUTRA HASIBUAN
[01:12:49]**

Namun, kami mendapatkan informasi juga bahwa PPT yang tadi disajikan oleh Pemohon tidak disiarkan melalui YouTube.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:12:55]

Oke.

**578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
265/PHPU.GUB-XXIII/2025: YAKUP PUTRA HASIBUAN
[01:12:56]**

Jadi, kami memohon kepada Majelis, apakah kami dapat mendapatkan copy (...)

579. KETUA: SALDI ISRA [01:12:59]

Oke.

**580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
265/PHPU.GUB-XXIII/2025: YAKUP PUTRA HASIBUAN
[01:12:59]**

Dari PowerPoint tadi Majelis? Terima kasih, Majelis.

581. KETUA: SALDI ISRA

Nanti PPT-nya diserahkan ya, yang dipresentasikan tadi, karena itu bagian dari persidangan. Kalau pihak lain mau minta, kita kasih juga, ya.

Oke, cukup?

**582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
265/PHPU.GUB-XXIII/2025: YAKUP PUTRA HASIBUAN
[01:13:11]**

Cu ... cukup. Terima kasih, Majelis.

583. KETUA: SALDI ISRA [01:13:13]

Ada yang lain?

584. TERMOHON: AANG KUNAIFI [01:13:15]

Izin, Yang Mulia, meralat tadi jumlah TPS.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]

Nah, ini baru sidang pertama, sudah main ralat saja ini, berapa itu jumlah TPS nya?

586. TERMOHON: AANG KUNAIFI [01:13:24]

Untuk lebih rincinya 60.751.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:13:28]

60.751?

588. TERMOHON: AANG KUNAIFI [01:13:32]

51. Yang kemudian TPS regular itu 60.617.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:13:38]

60.617.

590. TERMOHON: AANG KUNAIFI[01:13:40]

17. Ada 134 TPS di lokasi khusus, di antara 134 itu terbagi di lembaga pemasyarakatan sejumlah 65 TPS. Kemudian, di pondok pesantren ada 64 TPS dan di panti sosial ada 5 TPS.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:14:02]

Oke, terima kasih.

Untung Pak Afifudin enggak ada di sini nih, biar dikasih warning nih, salah-salah ini. Angka ini salah, repot kita.

Pak Totok, ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup semua, ya? Kita ini apa namanya? (...)

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:14:17]

Satu lagi, Yang Mulia.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]

Silakan!

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:13:18]

Ini terkait dengan keterangan Pihak Terkait. Ini jadwalnya kita untuk pastinya kapan itu, Yang Mulia, ya?

595. KETUA: SALDI ISRA [01:13:25]

Nanti akan diberi tahu, Anda harus baca hukum acaranya, ya? Ada di PMK begitu.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:13:31]

Soalnya ada rentang waktu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:13:35]

Anda baca di situ berapa terakhir kapan diserahkan, ya?

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:13:38]

Baik.

599. KETUA: SALDI ISRA [01:13:39]

Oke.

**600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[01:13:39]**

Terima kasih.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:13:40]

Ada lagi yang lain? Cukup? Kami mengapresiasi suasana tertib kita dalam ruang sidang ini dan mudah-mudahan suasana ini akan jadi modal kita untuk memutuskan dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 141, 160, 223, 265 dengan agenda penyampaian Permohonan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sudah selesai.

Dan sidang kita tunda untuk kemudian mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yang agendanya nanti akan diberitahukan oleh Mahkamah

Terima kasih, kita tutup. Dan sidang dinyatakan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.17 WIB

Jakarta, 8 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

